

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala petunjuk-Nya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur telah dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2023.

Dokumen LKIP sebagai salah satu parameter kesuksesan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran, sekaligus sebagai salah satu indikator Kinerja Instansi Pemerintah yang dilandaskan atas dasar prinsip akuntabilitas, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi jajaran aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta seluruh stakeholder sebagai alat ukur dan indikator pelaksanaan program pembangunan secara terpadu, terarah, dan terukur.

Dokumen LKIP Tahun Anggaran 2023 ini merupakan aktualisasi dari pelaksanaan program kerja Organisasi Perangkat Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai acuan dan panduan pelaksanaan program-program bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

Diharapkan Dokumen LKIP Tahun Anggaran 2023 ini dapat memberikan gambaran mengenai capaian kinerja dari Program, Kegiatan dan Anggaran yang telah direalisasikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik periode Tahun Anggaran 2023.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI.....	2
Ikhtisar Eksekutif.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	5
1.1 Latar Belakang .....	5
1.2. Dasar Hukum .....	5
1.3. Maksud Dan Tujuan.....	6
1.4 Gambaran Umum Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi NTT .....	6
1.5 Sistematika Penyajian.....	9
 BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	11
2.1. Perencanaan.....	11
2.2. Program Dan Kegiatan Tahun 2023 .....	13
2.3. Perjanjian Kinerja.....	15
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	19
3.1 Capaian kinerja organisasi Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.....	19
3.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir .....	21
3.3 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis .....	22
3.4 Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.....	24
3.5 Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan .....	24
3.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya .....	37
3.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja .....	37
3.8 Perbandingan Data Kinerja.....	43
3.9 Realisasi Anggaran.....	44
 BAB IV PENUTUP .....	47
4.1 Kesimpulan .....	47
4.2 Keberhasilan Dan Kegagalan Kinerja .....	47
4.3 Kendala Dan Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja .....	47
4.4 Strategi Pemecahan Masalah .....	48

## Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang diamanatkan kepada setiap Instansi Pemerintah. Tujuan penyusunan LKIP sebagai pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana strategis sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 merupakan wujud akuntabilitas kinerja kepada publik dan sekaligus memberikan gambaran mengenai capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2023, Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2023 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023. LKIP disusun melalui pengukuran kinerja Tahun Anggaran 2023 dengan membandingkan antara target kinerja yang ditetapkan dalam hasil Pengukuran Kinerja (PK).

Berdasarkan APBD Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur, Total Anggaran Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar **Rp. 184.352.330.860,00,-** dengan realisasi sebesar **Rp 148.186.934.029** atau **(80.38 %)**.

Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 terdapat 5 (lima) sasaran strategis yang harus dicapai dengan capaian kinerja sasaran berdasarkan indikator yang ditetapkan sebagai berikut :

Sasaran		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Interpretasi
1	Terwujudnya peningkatan pemahaman wawasan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Partai Politik (11), Organisasi kemasyarakatan (20), forum pembaruan kebangsaan (10), Lembaga Pendidikan Tingkat SMA/SMK (100) sederajat yang terlibat dalam program penguatan ideologi dan karakter kebangsaan. Total Lembaga : 141	100% (141 Lembaga)	138 Lembaga	97.8 7	Target Tercapai
2	Terwujudnya Pendidikan politik dan pembinaan partai politik di Nusa Tenggara Timur	Cakupan partai politik (11) dan Lembaga Pendidikan Tingkat SMA/SMK (298) yang terlibat dalam program peningkatan peran partai politik serta pengembangan etika dan budaya politik. Total Lembaga : 309	3,55% (11 Lembaga)	11 Lembaga	100	Target Tercapai
3	Meningkatnya jumlah organisasi kemasyarakatan yang di validasi	Cakupan peningkatan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan (49). Total Lembaga : 49	100% (49 ormas)	22 Ormas	44.9	Target Tidak Tercapai
4	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Meningkatnya ketahanan Organisasi kemasyarakatan terhadap ekonomi, sosial dan budaya.( 2 laporan)	100%	2 Dokumen	75 %	Target Tidak Tercapai
5	Terlaksananya peningkatan konflik sosial yang ditangani setiap tahun	Cakupan konflik sosial yang ditangani setiap tahun. ( 5 Dokumen)	100%	5 Dokumen	81.1 3 %	Target Tidak Tercapai

Dari 5 (lima) sasaran strategis Tahun 2023 terbagi kedalam 5 (lima) indikator kinerja, dengan capaian kinerja rata-rata kegiatan mencapai 79.60 %.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1.LATAR BELAKANG**

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap Instansi Pemerintah diwajibkan untuk memiliki SAKIP yang merupakan suatu rangkaian sistematis yang terdiri dari penyusunan dokumen perencanaan strategis berupa Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Instansi Pemerintah.

Secara teknis, tata cara penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Untuk mendukung perkembangan lingkungan strategis provinsi yang ada, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2023 memiliki rencana strategis yang perlu menjadi perhatian dalam menghadapi permasalahan utama atau Issue strategic adalah :

1. Peningkatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, dalam mengatasi masalah minimnya pemahaman terkait nilai-nilai Pancasila, ancaman radikalisme dan komunisme, maupun penolakan terhadap Pancasila terhadap ideologi negara perlu ditindak lanjuti dengan upaya yang serius dan strategis melalui pembiasaan nilai-nilai Pancasila;
2. Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik, dalam upaya mengatasi masalah peningkatan kualitas demokrasi, nilai demokrasi yang diidentikkan dengan nilai demokrasi menentukan pilihan, pada kenyataannya hanya berkembang dalam ritual dan seremonial di sebagian besar kalangan untuk hadir dalam memberikan suara pada saat pemilihan umum;
3. Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dalam upaya mengatasi masalah masyarakat yang belum mengetahui peraturan pembentukan organisasi masyarakat, serta memantau perkembangan keberadaan aktivitas Ormas.
4. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, dalam upaya mengatasi masalah melemahnya ketahanan toleransi antar beragama serta makin maraknya penggunaan Narkoba di kalangan lembaga pendidikan.
5. Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, dalam mengatasi masalah letak geografis Provinsi NTT di perbatasan 2 (dua) Negara Luar, dibutuhkan peningkatan kewaspadaan nasional dan daerah dianggap perlu terhadap permasalahan yang sensitif dan prinsip yang dapat mengganggu stabilitas keamanan, diantaranya yang bersifat ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dapat dilakukan langkah-langkah preventif melalui cegah dini dan deteksi dini, belum lagi potensi timbulnya konflik sosial ditengah masyarakat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban institusi atau organisasi melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan beserta penggunaan anggarannya.

## **1.2. DASAR HUKUM**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 dilandasi dasar hukum, sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018;
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Nomor :DPA/A.1/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023 Tanggal 10 November 2023.

## **1.3 TUJUAN**

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur yakni :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah atas pencapaian perencanaan kinerja target Penetapan Kinerja Tahun 2023.
2. Memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun selanjutnya.

## **1.4. GAMBARAN UMUM BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI NTT**

### **1. Tugas Pokok dan Fungsi**

Tugas Pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT mempunyai fungsi :

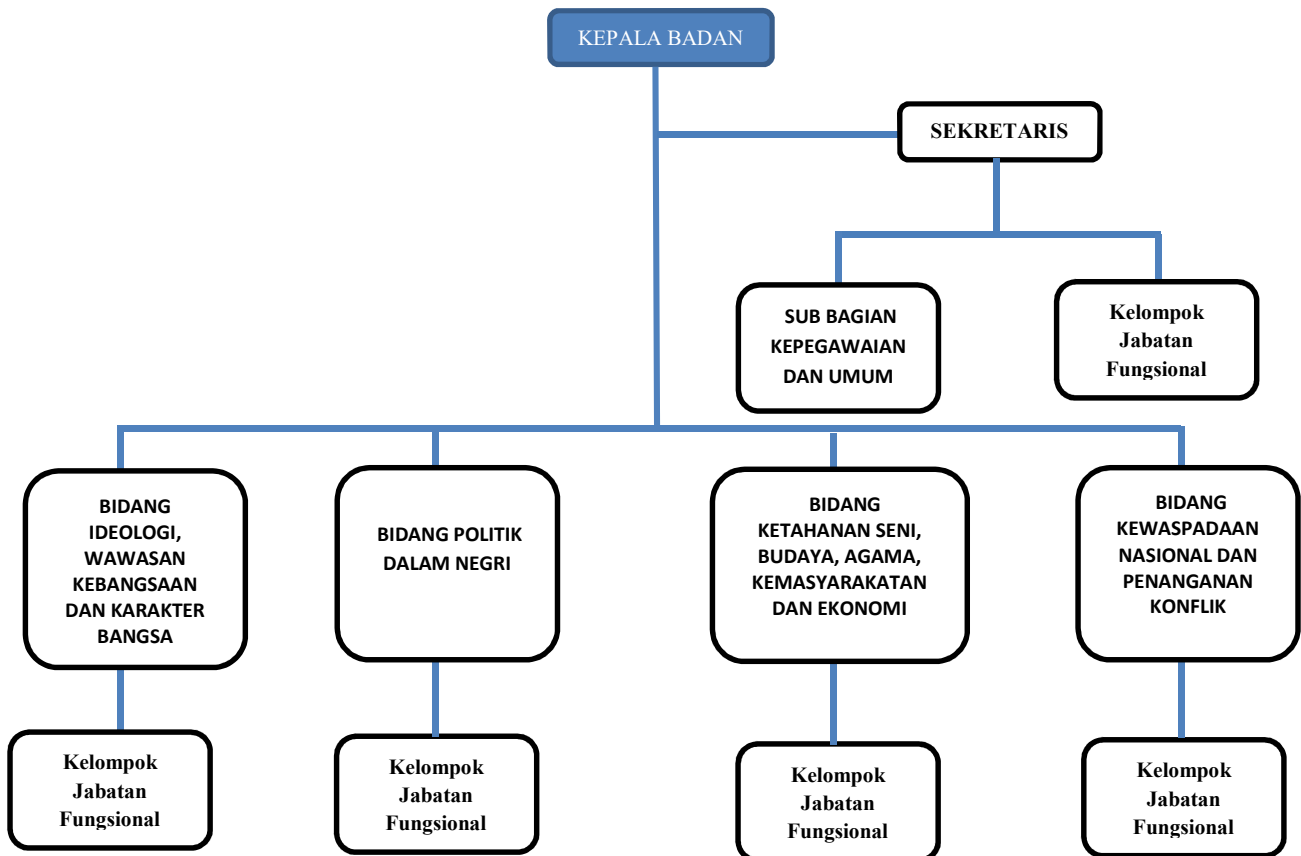
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

## 2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Kesbangpol Provinsi NTT sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan tugasnya dipimpin oleh seorang Kepala Badan didukung oleh 1 (Satu) orang Sekretaris yang membawahi 1 (satu) sub bagian dan 15 (lima belas) orang Kelompok Jabatan Fungsional, Kepala Bidang yang masing-masing membawahi 2 (dua) Kelompok Jabatan Fungsional, seperti uraian sebagai berikut :

- 1) Sekretariat, terdiri dari :
  - Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
  - Kelompok Jabatan Fungsional;
- 2) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, terdiri atas :
  - Kelompok Jabatan Fungsional
- 3) Bidang Kewaspadaan Nasional, terdiri atas :
  - Kelompok Jabatan Fungsional
- 4) Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi, terdiri atas :
  - Kelompok Jabatan Fungsional
- 5) Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri atas :
  - Kelompok Jabatan Fungsional .

2) Bagan struktur organisasi Badan Kesbangpol Provinsi NTT



### 3. Sumber Daya Aparatur

Jumlah Pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2023 sebanyak 37 orang, terdiri dari :

a. PNS sebanyak 37 orang dengan susunan sebagai berikut :

- |   |            |
|---|------------|
| 1) Kepala Badan                                 | : 1 orang. |
| 2) Sekretaris                                   | : 1 orang. |
| 3) Kepala Bidang                                | : 4 orang. |
| 4) Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum       | : 1 orang. |
| 5) Analis Keuangan Pusat dan Daerah             | : 1 orang. |
| 6) Perencana                                    | : 1 orang. |
| 7) Analis Kebijakan Ahli Muda                   | : 5 orang. |
| 8) Fungsional Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa | : 1 orang. |
| 9) Pengadministrasi Perkantoran                 | : 5 orang. |



- |                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| 10) Pengadministrasi Penerima | : 1 orang.  |
| 11) Arsiparis Pratama         | : 1 orang.  |
| 12) Penelaah Teknis Kebijakan | : 12 orang. |
| 13) Pranata Komputer          | : 3 orang   |
- b. Pegawai tidak tetap/tenaga kontrak sebanyak 8 orang :
- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Operator komputer | : 3 orang |
| 2) Tenaga pengemudi  | : 2 orang |
| 3) Tenaga kebersihan | : 1 orang |
| 4) Tenaga Keamanan   | : 2 orang |

#### 4. Sarana dan Prasarana Kantor

Berikut disajikan sarana dan prasarana yang dalam kondisi baik untuk mendukung kegiatan operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur, antara lain sebagai berikut :

- |                              |            |
|------------------------------|------------|
| 1) Kendaraan roda 4/ Minibus | : 2 buah   |
| 2) Tanah                     | : 4 Bidang |
| 3) Meja Pingpong             | : 1 buah   |
| 4) Papan Nama Kantor         | : 1 buah   |
| 5) Printer                   | : 13 buah  |
| 5) Komputer PC/CPU           | : 11 buah  |
| 6) Meja kerja                | : 10 buah  |
| 8) Handycam                  | : 2 unit   |
| 9) LCD Proyektor             | : 3 unit   |
| 10) Wirrales                 | : 1 unit   |
| 11) Sound System             | : 2 set    |
| 12) UPS Stabiliser           | : 10 buah  |
| 13) Router Modem Wifi        | : 3 unit   |
| 14) Laptop                   | : 5 unit   |
| 16) Kursi Tamu/ Sofa         | : 4 set    |
| 17) Kain Gorden              | : 1 paket  |
| 18) Lemari Arsip 2 pintu     | : 4 buah   |
| 19) Berangkas lokal          | : 1 buah   |
| 20) Rumah Dinas              | : unit     |
| 21) Kursi kerja kayu jati    | : 4 buah   |
| 22) Kulkas 1 pintu           | : 1 unit   |
| 23) Meja Rapat               | : 10 Buah  |
| 24) Hard disk                | : 4 Buah   |
| 25) Kursi Penjabat Ess 2     | : 4 Buah   |
| 26) Kursi Roda               | : 1 Buah   |

27)	Rak Arsip bahan besi	: 4 buah
28)	Panggung Rapat	: 1 Paket
29)	AC	: 16 unit
30)	Meja ½ biro	: 32 Buah
31)	Meja Biro	: 8 unit
32)	TV	: 1 unit
33)	Tirai kain Gorden	: 1 unit
34)	Pompa Air	: 3 unit
35)	Rumah dinas	: 4 unit
36)	Rumah dinas	: 4 unit

### 1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari :

#### Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang, landasan hukum, tugas dan fungsi serta sistematika penyajian LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT Tahun 2023.

#### Bab II Perencanaan Kinerja

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan yang menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, kebijakan dan program. Dokumen Penetapan Kinerja tahun 2022 yang menggambarkan tentang sasaran dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan serta program dan kegiatan yang harus dilaksanakan.

#### Bab III Akuntabilitas Kinerja

##### 3. Capaian Kinerja Organisasi.

Dalam bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 3.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
- 3.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
- 3.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra.
- 3.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional ( jika ada).
- 3.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
- 3.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

- 3.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.
- 3.8 Perbandingan Data Kinerja
- 3.9 Realisasi Anggaran

#### Bab IV Penutup

- 4.1 Keberhasilan Dan Kegagalan Kinerja
- 4.2 Kendala Dan Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja
- 4.3 Strategi Pemecahan Masalah

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Perencanaan

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2023 merupakan dokumen perencanaan yang memberikan gambaran dan arahan kebijakan dan strategi pembangunan pada tahun 2019-2023 sebagai tolok ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Provinsi NTT dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan dibidang urusan kesatuan bangsa dan politik.

#### 1. VISI

Visi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019 – 2024 yaitu **“Meningkatkan pengawasan Orang Asing, Lembaga Asing & Tenaga Kerja Asing di Nusa Tenggara Timur dan khususnya di pintu masuk perbatasan dan destinasi pariwisata”**.

Berdasarkan pada Visi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di atas, visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditetapkan sebagai berikut : **“NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia ”**.

Untuk memberikan pemahaman tentang maksud nilai-nilai dari Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur selanjutnya dijabarkan dalam penjelasan sebagai berikut :

**Masyarakat yang cerdas berdemokrasi**, artinya bahwa melalui visi ini seluruh masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih, menggunakan hak pilihnya secara sadar dan bertanggungjawab sehingga tercipta pemerintahan yang terlegitimasi.

#### 2. MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang telah digambarkan sebelumnya, misi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2019 - 2023 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu lima tahun (2019 – 2023), sehingga dalam penyusunan Rencana Strategis berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 - 2023 untuk mendukung pencapaian Visi Pemerintah Provinsi

Nusa Tenggara Timur dengan titik berat pada pencapaian Misi Agenda Pembangunan misi ke-5 (lima) yaitu : **Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.**

### 3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan dan Sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi sesuai dengan misi yang telah ditetapkan. Rumusan tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1.  
Tujuan dan Strategis Badan Kesbangpol Provinsi NTT Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Strategi
Mewujudkan Birokrasi yang Efektif, Efisien, Akuntabel dan Memberikan Pelayanan Publik yang Baik	❖ Terwujudnya Peningkatan Pemahaman wawasan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.	Penguatan dan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
	❖ Terwujudnya Pendidikan Politik dan Pembinaan partai politik di Nusa Tenggara Timur	Pembinaan dan penguatan terhadap Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik
	❖ Meningkatnya Jumlah Organisasi kemasyarakatan yang di validasi	Pengendalian, pendataan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
	❖ Meningkatnya ketahanan Organisasi Kemasyarakatan terhadap Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pengendalian dan Pembinaan ketahanan Organisasi Kemasyarakatan terhadap Ekonomi, Sosial dan Budaya
	❖ Terlaksananya Peningkatan Konflik Sosial yang ditangani setiap tahun	Peningkatan Konflik Sosial yang ditangani setiap tahun.

## 2.2. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023

Pada Tahun 2023 Badan Kesbangpol memiliki 5 (lima) Program dengan masing-masing memiliki target kinerja kegiatan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan	ANGGARAN (Rp)
1.	PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2,453,023,640
2.	PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantuan Situasi Politik.	174,042,905,860
3.	PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	61,424,000
4.	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	289,012,540
5.	PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.	2,342,737,320

### A. RENCANA KINERJA TAHUN 2023

Penetapan indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT didasarkan pada indikator kinerja yang tertuang dalam RPJMD Provinsi NTT Tahun 2019-2023 yang bertujuan untuk

memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Untuk Target kinerja tahun 2023 seperti pada tabel sebagai berikut :

**Tabel Target Kinerja Tahun 2023**

No	Indikator Sasaran		2023
			Target
1	Cakupan partai politik, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan dan forum pembaruan kebangsaan yang terlibat dalam program penguatan ideologi dan karakter kebangsaan (141 Lembaga).	Jumlah Partai Politik (11), Organisasi Kemasyarakatan (20) Forum Pembaruan Kebangsaan (10) dan Lembaga Pendidikan (100) yang terlibat dalam Program Penguatan Ideologi dan Karakter Kebangsaan (141 Lembaga).	100% (141 Lembaga)
2	Cakupan partai politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan yang terlibat dalam program peningkatan peran partai politik serta pengembangan etika dan budaya politik (309 Lembaga).	Jumlah Partai Politik (11) dan Lembaga Pendidikan (298) yang terlibat dalam Program Peningkatan Peran Partai politik serta pengembangan etika dan budaya politik (309 Lembaga).	3.55% (11 Lembaga)
3	Cakupan peningkatan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan (49 Lembaga).	Jumlah Organisasi Masyarakat	100% (49 ormas)
4	Meningkatnya ketahanan organisasi kemasyarakatan terhadap ekonomi, sosial dan budaya.	Persentase pembinaan dan pengembangan organisasi kemasyarakatan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan keagamaan/ 2 Dokumen	100%

5	Cakupan konflik sosial yang ditangani setiap tahun.	Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial/ 5 Dokumen	100%
---	---	--	------

### 2.3. PERJANJIAN KINERJA.

Indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT tersebut di buat dalam Perjanjian kinerja. Perubahan Perjanjian kinerja merupakan tekat dan janji pimpinan instansi dalam melaksanakan rencana kerja yang telah disusun dimana didalamnya menjanjikan atau menetapkan sasaran, indikator kinerja, dan target/rencana capaiannya serta anggaran yang akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan. Perubahan Perjanjian kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut: Dalam perjanjian kinerja juga ditetapkan anggaran untuk setiap kegiatan. Perubahan Perjanjian kinerja sendiri merupakan alat yang bermanfaat untuk mengukur apakah program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan serta untuk mengukur seberapa besar pencapaian target-target yang telah ditetapkan. Perubahan Perjanjian kinerja tahun 2023 pada tanggal 7 Desember 2023, dikarenakan adanya perubahan pada Anggaran atau Re-desain. Sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT tanggal 10 November 2023. Total anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT untuk tahun anggaran 2023 adalah Rp. **184.352.330.660,-** yang dipaparkan dalam bab III dan detil realisasi dan penggunaan dapat dilihat dalam dokumen Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2023. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara rencana dan realisasi dengan menggunakan variabel indikator kinerja masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome). Berikut tabel Tahapan Capaian Perjanjian Kinerja selama tahun 2023. Seperti Lampiran sebagai berikut :



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

A. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET	FORMULA INDIKATOR
			2022	2023	
1	Terwujudnya Peningkatan Pemahaman wawasan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.	Cakupan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Pendidikan dan Forum Pembaruan Kebangsaan yang terlibat dalam Program Penguatan Ideologi dan Karakter Kebangsaan (141 Lembaga).	85,1	100	Jumlah Papol, Ormas, FPK, <u>Lembaga Pendidikan</u> x 100 Jumlah Target Lembaga
2	Terwujudnya Pendidikan Politik dan Pembinaan partai politik di Nusa Tenggara Timur.	Cakupan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Pendidikan yang Terlibat dalam Program Peningkatan Peran Partai politik serta pengembangan etika dan budaya politik (309 Lembaga).	90,6	3.55	Jumlah Partai Politik, <u>Lembaga Pendidikan</u> x 100 Jumlah Target Lembaga
3	Meningkatnya Jumlah Organisasi kemasyarakatan yang di validasi.	Cakupan Peningkatan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan (49 Lembaga).	65,3	100	<u>Jumlah Ormas</u> x 100 Jumlah Target Lembaga
4	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.	Meningkatnya ketahanan Organisasi Kemasyarakatan terhadap Ekonomi, Sosial dan Budaya. (2 dokumen)	100	100	<u>Jumlah Laporan</u> x 100 Jumlah Target Laporan
5	Terlaksananya Peningkatan penanganan Konflik Sosial yang ditangani setiap tahun.	Cakupan Konflik Sosial yang ditangani setiap tahun. (5 Dokumen)	100	100	<u>Jumlah Laporan</u> x 100 Jumlah Target Laporan

## B. Pelaksanaan Anggaran

No	Uraian	Alokasi	Keterangan
1)	APBD		
	a) Belanja (Program)	<b>Rp. 184,352,330,860</b>	Realisasi minimal 85 %
	1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 5.163.227.500	Realisasi minimal 90 %
	2. Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Rp. 2.453.023.640	Realisasi minimal 85 %
	3. Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 61.424.000	Realisasi minimal 85%
	4. Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi,Sosial, Dan Budaya	Rp. 289.012.540	Realisasi minimal 85 %
	5. Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp. 174.042.905.860	Realisasi minimal 85 %
	6. Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 2.342.737.320.	Realisasi minimal 85 %
	b) Pendapatan	<b>Rp. 21.000.000</b>	Realisasi minimal 90%
	Jumlah Belanja + Pendapatan (APBD)	Rp. 184.373.930.860	Realisasi minimal 90%
2)	APBN		
	Program (Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan)	<b>Rp. -</b>	-
	1. -	-	-
	Jumlah Dekonsentrasi + Tugas Pembantuan	<b>Rp. -</b>	-

- C. Belanja menggunakan Aplikasi E-Purchasing Minimal 40% dari Pagu Belanja pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah
- D. Penyampaian LKPD, LPPD/LKPJ, dan LKIP paling lambat tanggal 4 Februari 2023
- E. Nilai Pelaksanaan SAKIP Minimal Kategori BB (>70-80)
- F. Nilai PMPRB Minimal Kategori A (> 80 -90).
- G. Rata-rata realisasi Kinerja Individu dalam SKP minimal 90%.
- H. Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK dan APIP:
  - 1. TL temuan di bawah tahun 2023; Administrasi 100 %, Non Administrasi minimal 80 %
  - 2. TL temuan di atas tahun 2023; Administrasi 100% Keuangan 80 %
- I. Jumlah Inovasi Minimal 2 (dua) jenis.
- J. Pengelolaan Tata Naskah Dinas dan penerapan Tanda Tangan Elektronik melalui Aplikasi Srikandi paling Januari 2023.
- K. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Minimal Kategori Baik (76,61-88,30) .
- L. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Minimal Kategori Menuju Informatif (76.99%)
- M. Jumlah Kerjasama dengan Lembaga mitra/NGO/LSM/Pihak lain yang mendukung pencapaian target IKU Perangkat Daerah

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi dan Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023.

Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT Tahun 2023 merupakan tolak ukur keberhasilan Badan Kesbangpol dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan.

➤ **Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023.**

Perbandingan ini sesuai dengan tabel berikut :

Tabel A.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET/REALISASI KINERJA		Keterangan Realisasi Target
			TARGET 2023	REALISASI 2023	
1	Terwujudnya Peningkatan Pemahaman Wawasan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Forum Pembaruan Kebangsaan yang terlibat dalam program penguatan ideologi dan karakter kebangsaan / 141 lembaga	100% atau 141 lembaga	97.87 % atau 138 Lembaga	Meningkatnya pemahaman wawasan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan bagi partai politik, Organisasi Kemasyarakatan, Forum Pembaruan Kebangsaan dan Lembaga Pendidikan tingkat SMA / sederajat = 138 lembaga
2.	Terwujudnya Pendidikan politik dan pembinaan partai politik di Nusa Tenggara Timur	Cakupan partai politik, organisasi kemasyarakatan an Lembaga Pendidikan yang terlibat dalam program peningkatan peran partai politik serta pengembangan etika budaya politik / 309 lembaga	3.55 % atau 11 lembaga	100%	Meningkatnya Pendidikan politik dan Pembinaan bagi partai politik (11 parpol)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET/REALISASI KINERJA		Keterangan Realisasi Target
			TARGET 2023	REALISASI 2023	
3.	Meningkatnya jumlah organisasi kemsayarakatan yang divalidasi	Cakupan peningkatan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	100 % (49 Ormas)	44,89 % atau 22 Ormas dari 49 ormas	Meningkatnya pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan sejumlah 22 ormas
4.	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Meningkatnya ketahanan organisasi kemasyaraktan terhadap ekonomi, sosial dan budaya.( 1 dokumen Hibah dan 1 dokumen terdiri dari 7 Laporan P4GN.	100%/ 2 dokumen 7 Laporan	75 % atau 1 Dokumen Hibah FKUB dan 1 Dokumen P4GN dari 3 laporan	Meningkatnya ketahanan organisasi kemasyarakatan terhadap ekonomi sosial dan Budaya, (1 dokumen Hibah dan 1 dokumen terdiri dari 4 Laporan P4GN)
5.	Terlaksananya peningkatan penanganan konflik sosial yang ditangani setiap tahun	Cakupan konflik sosial yang ditangani setiap tahun	100%	81.13 %	Meningkatnya pemantapan kewaspadaan nasional serta penanganan konflik sosial, kerjasama intelijen dan pemantuan orang asing sejumlah : 5 dokumen

Kesimpulan pencapaian target pada sasaran strategis pada 5 sasaran strategis yaitu :

- 1) Peningkatan Pemahaman Wawasan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan : 97.87 %
- 2) Pendidikan politik dan pembinaan partai politik di Nusa Tenggara Timur : 100 %
- 3) Meningkatnya jumlah organisasi kemsayarakatan yang divalidasi : 44.89 %
- 4) Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya : 75 %
- 5) Terlaksananya peningkatan konflik sosial yang ditangani setiap tahun : 81.13 %

Rata-rata pencapaian sasaran strategis adalah 79.60 %.

### 3.2 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu .

Perbandingan ini sesuai dengan tabel berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PERSENTASE REALISASI KINERJA		Lembaga/ Laporan	Perbandingan Realisasi Target	
			2022	2023		2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya Peningkatan Pemahaman Wawasan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Forum Pembaruan Kebangsaan yang terlibat dalam program penguatan ideologi dan karakter kebangsaan / 141 lembaga	166.7	97.87	partai politik	11	-
					Ormas	6	-
					FPK	28	29
					Lembaga Pendidikan tingkat SMA/ sederajat :	90	109
					Jumlah	200	138
2.	Terwujudnya Pendidikan politik dan pembinaan partai politik di Nusa Tenggara Timur	Cakupan partai politik & Lembaga Pendidikan yang terlibat dalam program peningkatan peran partai politik serta pengembangan etika budaya politik / 309 lembaga	100	100	partai politik	11	11
					Lembaga Pendidikan tingkat SMA / Sederajat	0	0
					Jumlah	11	11
3.	Meningkatnya jumlah organisasi kemasyarakatan yang divalidasi	Cakupan peningkatan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan/ 49 lembaga	96,3	44.89	Organisasi kemasyarakatan	26	22
4.	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Meningkatnya ketahanan organisasi kemasyarakatan terhadap ekonomi, sosial dan budaya	100	75	Meningkatnya ketahanan organisasi kemasyarakatan terhadap ekonomi sosial dan Buda	2 Dok	2 Dok/ 5 Lap

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Terlaksananya peningkatan penanganan konflik sosial yang ditangani setiap tahun	Cakupan konflik sosial yang ditangani setiap tahun	100	81.13	Meningkatnya pemantapan kewaspadaan nasional serta penanganan konflik sosial, kerjasama intelijen & pemantuan orang asing	2 Lap	5 Dok

Kesimpulan Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Pemahaman Wawasan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, MENINGKAT menjadi : 97.87 % dibandingkan tahun 2022 : 166.7 % atau selisih : 68, 83%
- 2) Terlaksananya Pendidikan politik dan pembinaan partai politik di Nusa Tenggara Timur, tetap menjadi : 100 % dibandingkan tahun 2022 : 100 %
- 3) Menurunnya jumlah organisasi kemasyarakatan yang divalidasi, menurun menjadi : 44.89 % berbanding dengan tahun 2022 : 96,3% atau selisih : - 51,41%
- 4) Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, Menurun : 75 % TIDAK sama dengan tahun 2022 : 100% atau selisih - 21.43%
- 5) Terlaksananya peningkatan konflik sosial yang ditangani setiap tahun, tetap : 81.13 % sama dengan tahun 2022 : 100%

Rata-rata pencapaian sasaran strategis adalah 79.60 %.

### 3.3 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET/REALISASI KINERJA			Target Renstra Jangka Menengah
			TARGET 2023	TARGET PERUBAHAN 2023	REALISASI 2023	
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Peningkatan Pemahaman Wawasan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Forum Pembaruan Kebangsaan yang terlibat dalam program penguatan ideologi dan karakter kebangsaan / 141 lembaga	100 % atau 141 lembaga	100 %	97.87 % atau 138 Lembaga	100% atau 141 lembaga

1	2	3	4	5	6	7
2.	Terwujudnya Pendidikan politik dan pembinaan partai politik di Nusa Tenggara Timur	Cakupan partai politik, organisasi kemasyarakatan Lembaga Pendidikan yang terlibat dalam program peningkatan peran partai politik serta pengembangan etika budaya politik / 309 lembaga.	3,55 % atau 11 lembaga	3,55	100%	100 % atau 11 lembaga
3.	Meningkatnya jumlah organisasi kemasyarakatan yang divalidasi	Cakupan peningkatan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	100 % atau 49 Lembaga	100	44.89 % atau 22 lembaga	100% atau 49 Ormas
4.	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Meningkatnya ketahanan organisasi kemasyarakatan terhadap ekonomi, sosial dan budaya	100%	100%	75%	100%/ 2 Dokumen
5.	Terlaksananya peningkatan penanganan konflik sosial yang ditangani setiap tahun	Cakupan konflik sosial yang ditangani setiap tahun	100%	100%	81.13 %	100%/ 5 Dokumen

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra. menunjukkan bahwa dari 5 (lima) indikator terdapat 1 perubahan target indikator, sesuai dengan perubahan Perjanjian Kinerja tanggal 7 Desember 2023. 1 Indikator tersebut adalah :

- 1) Terwujudnya Pendidikan politik dan pembinaan partai politik di Nusa Tenggara Timur yang sebelumnya target indikator adalah 100% atau 309 lembaga menjadi 3,55% atau 11 Lembaga, atau mencapai realisasi 100%.

### 3.4 Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional ( jika ada).

Tidak ada.

### 3.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.



Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pengukuran kinerja sasaran strategis, dilakukan pengukuran melalui media dokumen Penetapan Kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya yang disajikan dalam formulir Pengukuran Kinerja. Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Pada Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai Visi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengacu pada Visi Gubernur NTT sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2023. Evaluasi dan analisis atas capaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan indikator kinerja sasaran dijabarkan sebagai berikut :

Faktor-Faktor penyebab Keberhasilan.

1. Faktor Internal.

Faktor dari dalam instansi/organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu : Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan. Dimaksudkan adalah kemampuan Kepemimpinan dalam organisasi dalam memanejemen output pelaksanaan kegiatan yang berfokus sesuai anggaran dalam relisasi dari Dokumen Pelaksana Anggaran tahun 2023.

2. Faktor Eksternal.

Faktor penyebab keberhasilan dari luar organisasi yaitu : Organisasi Lain. Dimaksudkan adalah Organisasi lain yang memberikan sumbangsih baik mendukung pencapaian sasaran strategis seperti menghadiri dan mengikuti pelaksanaan kegiatan.

➤ Penjelasan Faktor Internal

■ Analisis penyebab keberhasilan.

**1) Keberhasilan pada Sasaran strategis Peningkatan Pemahaman Wawasan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan : 97.87 % atau 138 Lembaga %.**

Faktor Penyebab Keberhasilan adalah Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan.

Peningkatan Koordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota di 22 Kabupaten/Kota, serta Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tingkat Kabupaten/Kota. Untuk mengikut sertakan Lembaga Pendidikan Tingkat SMA/ sederajat pada Pelaksanaan Kegiatan : Paskibraka pada 1 Juni 2023 atau Hari Lahir Pancasila. Dan kegiatan Paskibraka Tingkat Provinsi atau pada saat 17 Agustus 2023. Jumlah Lembaga Pendidikan Tingkat SMA/ sederajat : 94. Forum Pembauran Kebangsaan : 29 Lembaga. Jumlah Total : 138 Lembaga.

**2) Keberhasilan pada Sasaran strategis Pendidikan politik dan pembinaan partai politik di Nusa Tenggara Timur pada 11 Partai Politik.**

Faktor Penyebab Keberhasilan adalah Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan. Dimaksudkan adalah Pelaksana program mampu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait seperti Partai Politik atau pihak/instansi lain dalam melaksanakan kegiatan dalam DPA maupun diluar DPA dalam rangka mendukung pencapaian target indikator.

➤ Berdasarkan kegiatan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran :

**a) Rapat Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik**

- Hari/Tanggal : Rabu, 7 Juni 2023
- Tempat Pelaksanaan : Aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT
- Peserta Rapat : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol Prov. NTT, LusianaHermanus, SH, MH, Okto HS. Tabelak (Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT), Jeffry A. Galla (KPU Provinsi NTT), Emerensiana Purnawati (KPU Provinsi NTT), Donatus Rino (KPU Provinsi NTT), Paulus S. Nitbani (Kakanwil Hukum dan HAM Provinsi NTT), Arnoldus Bailao (Kakanwil Hukum dan HAM Provinsi NTT), Tarsisius L. Apelabi (Inspektorat Provinsi NTT), Herman (Biro Hukum Setda Provinsi NTT).
- Pembahasan : Pada kegiatan rapat ini membahas :
  - Hasil Pemeriksaan BPK terhadap LPJ Partai Politik Penerima Bantuan keuangan Tahun Anggaran 2022, yang telah dilaksanakan/audit pada Bulan Januari sampai dengan Mei 2023, telah diserahkan kepada masing-masing Partai Politik.
  - Penyampaian Proposal Permohonan Bantuan Keuangan 11 (sebelas) Partai Politik Tahun 2023 dari masing-masing Partai Politik telah diterima dan di verifikasi oleh Tim Verifikasi kelengkapan administrasi saat ini, sesuai peraturan yang berlaku.
  - Penyampaian besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik berdasarkan jumlah perolehan suara sah dari masing-masing Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Provinsi NTT hasil Pemilu 2019-2024, dimana terdapat 11 (sebelas) Partai Politik yang berhak mendapatkan bantuan keuangan partai politik.
  - Menyampaikan Tugas dan tanggungjawab Tim Verifikasi dalam memverifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan keuangan oleh PartaiPolitik dengan kegiatan yang terfokus pada Pendidikan Politik sebesar 60 % atau lebih dan Operasional Sekretariat sebesar 40 %.

**b) Rapat Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik dari BPK RI Perwakilan NTT Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur**

- Hari/Tanggal : Kamis, 08 Juni 2023
- Tempat Pelaksanaan : Ruang kerja Bidang Politik dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT
- Pembahasan : Pada kegiatan rapat ini membahas Penjelasan lanjutan Tupoksi Tim Sekretariat Pencairan Bantuan Keuangan Partai Politik sesuai surat Keputusan kepala Badan Kesbangpol Provinsi NTT dan Diskusi/Warna Sari, rapat dipimpin oleh Kepala Bidang Politik dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT. Peserta yang hadir dalam rapat adalah tim Sekretariat Pencairan Bantuan keuangan partai politik tahun anggaran 2023.

**c) Rapat bersama Tim Kelompok Kerja (POKJA) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tingkat Provinsi NTT Tahun 2023**

- Hari/Tanggal : Jumat , 15 Desember 2023.
- Tempat Pelaksanaan : Aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT
- Pembahasan : Pada kegiatan rapat ini membahas berdasarkan 22 Indikator dari ketiga Aspek yang diukur, untuk Aspek Kebebasan terdapat 7 (tujuh) Indikator, Aspek Kesenjangan terdapat 7 (tujuh) Indikator, dan Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi terdapat 8 (delapan) Indikator. Nilai, 89,06, Aspek Kesenjangan 74,43, dimana Indikator yang masih rendah yakni Indikator 9, Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui Lembaga Perwakilan (DPRD) dengan Nilai 30,77. Sedangkan, Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi 70,83, tergambar bahwa Indikator yang masih Rendah Nilainya terdapat pada Indikator 20, Transparansi Anggaran dalam bentuk Penyediaan Informasi APBN/D oleh Pemerintah dan Indikator 21, Kinerja Birokrasi dalam Pelayanan Publik dengan Nilai masing-masing yakni 42,86 dan 56, 20 point. Atau sebanyak 3 dari 22 Indikator masih berada dalam kategori rendah. Pokja IDI diberi ruang yang luas untuk meningkatkan peran dalam menarik Indeks demokrasi ke depannya.

**3) Kegagalan *pada Sasaran Strategis Meningkatnya jumlah organisasi kemasyarakatan yang divalidasi* .**

Faktor Penyebab Kegagalan adalah Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan dengan Organisasi diluar organisasi. Organisasi diluar yang dimaksud adalah Organisasi masyarakat yang mengajukan permohonan penyampaian kelengkapan administrasi . Pendaftaran Ormas selama Tahun 2023 adalah 22 Ormas yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku. Kegagalan ini merupakan dari faktor eksternal atau faktor luar dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu dari obyek atau organisasi masyarakat yang mendaftar dan memenuhi aturan dari target 49 (empat puluh sembilan) tetapi yang memenuhi persyaratan adalah 22 (dua puluh dua) Organisasi Masyarakat, hasilnya adalah seperti tabel berikut ini :

No	Nama Ormas	Tanggal Skpo	Tanggal Pendirian	Bidang Kegiatan	Nama Pengurus	Alamat
1.	Forum Komunikasi Keluarga Purnawirawan Baret Merah Provinsi NTT	11/01/2023	11/09/2020	Sosial Kemasyarakatan	Drs. Clementino Castelo	Jl. Prof. Dr. Herman Yohanes
2.	Dewan Pimpinan Wilayah Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia	11/01/2023	22/09/2022	Pendidikan Jurnalistik	Gabriel Joseph Mboeik	Jl. Meranti Oebobo Kupang
3.	Ikatan Tdm Flotim	11/01/2023	01/12/2020	Sosial Kemasyarakatan	Frans K. Atawuwur	Jl. Gua Maria Lembata
4.	Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia	31/01/2023	23/12/1957	Sosial Kemasyarakatan	Prof. Dr. I Gusti B. Arjana	Jl. Basuki Rahmat Naikolan
5.	Dpd Persatuan Terapis Gigi Dan Mulut Indonesia Provinsi NTT	29/03/2023	13/09/1996	Sosial Kemasyarakatan	Yonaas Laga	Jl. Amabi Gang Granda
6.	Yayasan Bna Karta Lestari	31/04/2023	15/02/1986	Sosial Kemasyarakatan	Feri Prihantoro, St	Lacang Wae Kelambu, Labuan Bajo
7.	Dpd NTT Patriot Pejuang Bangsa	05/04/2023	30/06/2021	Sosial Kemasyarakatan	Melchianus Nonna	Jl. Jenderal Sudirman Kota Raja
8.	Dpw Lsm Baladhika Adhyaksa Nusantara Provinsi NTT	26/04/2023	08/01/2019	Sosial Kemasyarakatan	Lede Mude Duka	Jl. Fetor Funay Btn
9.	Dpd Timorest Gab Mandiri Untas Provinsi NTT	27/04/2023	22/05/2017	Sosial Kemasyarakatan	Bernardus Neno	Jl. Silwan Maulafa
10.	Yayasan Pelita Kehidupan Masyarakat	13/06/2023	15/12/2014	Sosial Kemasyarakatan	Mathias Rupidara	Kampung Baru Tts
11.	Gerakan Anti Narkoba Dan Zat Adiktif Nasional NTT	19/06/2023	24/02/2018	Sosial Kemasyarakatan	Edy Nahak	Jl. W. Monginsidi Iii Pasir Panjang
12.	Dpd Himpunan Putra Putri Keluarga Angkatan Darat	21/07/2023	20/09/2017	Sosial Kemasyarakatan	Antonius Watu Raka	Jl. Atambua Pasir Panjang
13.	Dpd Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia NTT	07/08/2023	11/09/2014	Pengawasan Aset	Rezky Yunike Frans	Jl. Jenderal Sudirman Kota Raja
14.	Yayasan Kebudayaan Nusantara	07/08/2023	15/12/2015	Kemanusiaan, Keagamaan, Usaha Ekonomi Dan Kebudayaan	Joseph Mure	Jl. Oebon I Sikumana Maulafa
15.	Yayasan Pulau Pasir Rote	16/08/2023	25/07/2023	Sosial Kemasyarakatan	Yusak Langga	Jl. Thomas Penun Limau

No	Nama Ormas	Tanggal Skpo	Tanggal Pendirian	Bidang Kegiatan	Nama Pengurus	Alamat
16.	Yayasan English Goes To Kampung	19/09/2023	01/08/2019	Sosial Kemasyarakatan	Sri Wahyuningsih	Desa Lamboya Bawa Sumba Barat
17.	Yayasan Cinta Orang Percaya	26/09/2023	19/06/2023	Sosial Kemasyarakatan	Irwan Thiodoris	Jl. Swakarya Koenino
18.	Dpd Aban Gajendra Radmila Provinsi NTT	20/07/2023	29/09/2022	Sosial Kemasyarakatan	Piter Pello	Jl. Oebolifo Sikumana
19.	Dpd Pijar Nusa Bangsa	13/06/2023	15/2022	Sosial Kemasyarakatan	Ibrahim Iki	Jl. Karantina Belu
20.	Dpd Lsm Peduli Hukum Keadilan Kemanusiaan Dan Hak Asasi Manusia Provinsi NTT	02/10/2023	16/08/2016	Sosial Kemasyarakatan Dan Hukum	Alexander Saba	Jl. Ade Irma Kelapa Lima
21.	Yayasan Apostolos Suku Bangsa	14/11/2023	26/09/2023	Sosial Kemasyarakatan	Asnat Pantola	Kelapa Lima Kota Kupang
22.	Ikatan Warga Maluku NTT	18/12/2023	05/02/1980	Sosial Kemasyarakatan	Ir. Elvianus Wairata	Jl. Shopping Centre Oebobo

#### 4) Kegagalan pada Sasaran strategis *Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya*

Faktor kegagalan dalam mencapai Sasaran strategis ini yaitu anggaran untuk pelaksana program dalam melaksanakan kegiatan tidak bisa dicairkan seluruhnya. Target pelaksana program dimaksudkan adalah 2 Dokumen, yang terdiri dari target 1 Dokumen FKUB tentang Hibah FKUB. Dan 1 Dokumen P4GN, yang terdiri dari target 6 Laporan Kegiatan. 6 Laporan ini terdiri dari 1 Laporan Sosialisasi P4GN di Kota Kupang, 5 Laporan evaluasi fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) di Kabupaten Flores Timur, TTS, TTU, Belu, Rote Ndao, Kab Kupang, Kota Kupang.

Pada Pelaksanaan target kegiatan tersebut, anggaran dicairkan dan dapat dilaksanakan adalah 1 Dokumen Hibah kepada FKUB sejumlah Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta).

Dan pelaksanaan 1 Dokumen P4GN, anggaran hanya dapat dicairkan untuk membiayai 3 Laporan Hasil kegiatan dari target 6 Laporan, yaitu Laporan evaluasi fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) di Kabupaten TTU, Belu, Rote Ndao.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait sebagai peserta kegiatan. Dan mengefisiensi anggaran untuk belanja hibah dilaksanakan tepat waktu. Dimulai dengan meneliti proposal Hibah dari FKUB sampai dengan pencairan anggaran hibah tersebut. Dengan uraian kegiatan adalah sebagai berikut :

- FKUB.

Kegiatan pemberian Hibah Bantuan Keuangan kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur dilaksanakan melalui proses sebagai berikut :

### **1. Penyusunan Surat Keputusan Gubernur tentang FKUB**

Penyusunan atau pembuatan Surat Keputusan Gubernur ini berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Untuk itu yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol sebagai berikut:

- Badan Kesbangpol bersurat kepada organisasi keagamaan untuk meminta nama-nama tokoh agama .
- Penyusunan draf Keputusan Gubernur yang selanjutnya diajukan ke biro hukum untuk dokoreksi dan ditandatangani.
- Penetapan Surat Keputusan Gubernur Nomor: 153/KEP/HK/2023 tanggal 4 April 2023 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur

### **2. Verifikasi dan Klarifikasi proposal Bantuan Keuangan FKUB**

Verifikasi dan klarifikasi proposal Bantuan Keuangan FKUB dilaksanakan pada Hari Selasa, Tanggal 26 Juni 2023, bertempat di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur, hasil yang dicapai adalah:

- Terlaksananya Verifikasi dan Klarifikasi terhadap proposal bantuan keuangan
- Persyaratan administrasi perlu dilengkapi lagi oleh FKUB diantaranya Pakta Integritas, Bukti Buku Bank dengan Nomor Rekening Bank atas nama FKUB.

### **3. Penyusunan Naskah Perjanjian Hibah/Bantuan Keuangan FKUB**

Penyusunan Naskah Perjanjian Hibah/Bantuan Keuangan KUB didasarkan pada Keputusan Gubernur NTT Nomor : 188/KEP/HK/2023, tanggal 5 Mei 2023 tentang Perubahan Atas Lampiran II Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 153/KEP/HK/2023 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama

Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 tentang Hibah Bantuan Keuangan kepada Forum Kerukunan Umat Beragama Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023, hasil yang dicapai adalah :

- Tersusun dan ditanda tangannya Naskah Perjanjian Naskah Hibah Bantuan Keuangan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Ketua FKUB Tingkat Provinsi.

Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan Bantuan Keuangan/Hibah kepada Forum Kerukunan Umat Beragama Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

- Telah diterbitkannya Keputusan Gubernur tentang Forum Kerukunan Umat Beragama Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;
- Telah dilaksanakannya verifikasi dan klarifikasi atas proposal Bantuan Keuangan kepada Forum Kerukunan Umat Beragama Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;
- Tersusunnya dan ditanda tangannya Naskah Perjanjian Naskah Hibah Bantuan Keuangan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Ketua FKUB Tingkat Provinsi.
- Telah disalurkan Bantuan Keuangan/Hibah kepada Forum Kerukunan Umat Beragama Tingkat Provinsi NTT Tahun 2023 sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
- Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN).

A. Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN)

Kegiatan Perjalanan Dinas Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) dilaksanakan pada Kabupaten Belu, TTU dan Rote Ndao. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah mengevaluasi pelaksanaan kegiatan P4GN Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan adalah Kabupaten Flores Timur , Kabupaten Kupang dan Kota Kupang.

■ Analisis penyebab kegagalan.

Penyebab kegagalan adalah pencairan anggaran untuk pelaksana program dalam melaksanakan kegiatan tidak bisa dicairkan seluruhnya. Atau pelaksanaan 3 Laporan Kegiatan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) dari 6 laporan P4GN.

5) ***Kegagalan dan keberhasilan pada Sasaran strategis peningkatan penanganan konflik sosial yang ditangani setiap tahun.***

Target dimaksudkan adalah menyelesaikan target 5 Dokumen, dengan realisasi 43 pelaporan dari 53 laporan adalah 81.13 % yaitu terdiri dari :

1. **Rapat dalam rangka kontingensi bidang kewaspadaan nasional dan kerjasama intelijen/instansi terkait/ormas/lembaga/kelompok dalam rangka laporan situasi keamanan daerah teraktual untuk pelaporan forkopimda**, target 4 laporan dengan realisasi 4 Laporan atau 100 %, adalah sebagai berikut

1) **POJOK INTELIJEN (Pertama)**

- Hari/Tanggal : Kamis, 21 September 2023

- Tempat Pelaksanaan : Hotel Krystal Kupang
- Kesimpulan Hasil Rapat :
  - Cuaca Ekstrem yang melanda hampir seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berdampak kekeringan serta kelangkaan bahan pangan dan kenaikan harga beras.
  - Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bahwa masih adanya tenaga kerja ilegal yang pulang ke Indonesia dalam keadaan sudah tidak bernyawa, perlu adanya tindakan pengawasan terhadap tenaga kerja yang berangkat tanpa dokumen yang sah/non procedural.
  - Kampanye gelap (Hoax) dalam menghadapi kondisi Politik di tahun 2023 terkait Pemilu dan Pilkada serentak 2024

## **2) Rapat Pojok Intelijen (Kedua)**

- Hari/Tanggal : Kamis, 16 November 2023
- Tempat Pelaksanaan : Ruang Rapat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.NTT
- Kesimpulan Hasil Rapat :
  - Kejaksaan Tinggi NTT bersedia memediasi/fasilitasi upaya penyelesaian perbedaan pendapat penundaan tahapan NPHD dari Pemerintah Daerah NTT kepada KPU dan Bank NTT.
  - KPU NTT siap melakukan sosialisasi PKPU Nomor 15 tahun 2023 tentang Masa Kampanye Pemilihan Umum kepada semua Lembaga
  - Akhir masa jabatan Komisioner KPU dan Bawaslu secara resmi sesuai dengan masa bakti yang telah ditetapkan yaitu KPU tanggal 03 Februari 2024 sedangkan Bawaslu tanggal 07 Februari 2024.
  - Data calon pemilih yang belum memiliki E-KTP sebanyak 281.792 terhitung tanggal 10 November tersisa 169.112 orang. Diminta Pemerintah Kab/Kota melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan upaya percepatan kepemilikan E-KTP.
  - Persoalan tempat penyimpanan logistik di Kab. TTS yang menggunakan GOR Nakamese dan telah dilakukan kontrak antara Pemerintah Daerah TTS dan KPUD TTS, diharapkan dilakukannya upaya penyelesaian kedua pihak secara arif dan tidak bertentangan dengan aturan yang ada.
  - TNI AU bersedia membantu pendistribusian logistik pemilu melalui jalur udara.
  - Deklarasi Pemilu damai akan dilaksanakan pada Selasa 28 November 2023, bersamaan dengan dimulainya masa kampanye.

## **3) Rapat Konsolidasi dan Pembahasan Masalah-Masalah Aktual Bersama Badan Intelijen Strtegis (Bais)**

- Hari/Tanggal : Jumat, 17 Februari 2023
- Tempat Pelaksanaan : Aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT
- Peserta Rapat :
- Kesimpulan Hasil Rapat :
  - Harga pangan yang melonjak terutama beras di beberapa Kabupaten/Kota, seperti Kota Kupang, Kab. Flores Timur, Sikka, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya.



- Menurunnya daya beli masyarakat terhadap beberapa kebutuhan pokok yang berpotensi menimbulkan gejolak sosial.
- Meningkatnya kasus kriminal seperti pencurian sebagai dampak dari kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat.
- Kondisi Politik di tahun 2023 terkait Pemilu dan Pilkada serentak 2024
- Imigran gelap yang melintas batas wilayah RI (terbaru 6 orang imigran gelap asal India yang ditangkap di Rote).
- Pendeportasian 15 orang Warga negarai Indonesia dari Republik Demokratik Timor Leste yang tidak memiliki dokumen keimigrasian.
- Penyelundupan Bahan Bakar Minyak dan Rokok di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste.
- Ancaman penyusupan intelijen asing dengan memanfaatkan situasi perbatasan Indonesia-Timor Leste yang agak longgar.
- Perlu ada kepastian batas waktu tinggal untuk para imigran di tempat penampungan, yakni Hotel Ina Boi, Lavender dan Kupang Inn serta Rudenim.

#### **4) Rapat Pojok Intelijen (ketiga)**

- Hari/Tanggal : Sabtu, 23 Desember 2023
- Tempat Pelaksanaan : Twins resto
- Kesimpulan Hasil Rapat :
  1. Masih adanya perbedaan data baik KPU dan Dinas Kesehatan dan Catatan Sipil Provinsi.
  2. Terdapat 2 kabupaten yaitu Kab. Malaka dan kab. Sumba Tengah KPU terkendala untuk memperoleh data baik itu DPT atau kepemilikan E-KTP.
  3. Untuk logistic saat ini untuk Kab. Alor khususnya di kalabahi ada 3 jenis surat suara DPR RI, DPR Prov dan DPR Kabupaten yang seharusnya tiba di tanggal 26 desember harus di geser tanggal 2 januri 2024 dikarenakan transportasi laut yang melalui kalabahi hanya ada 2 kapal sehingga terjadi pergeseran pengiriman logistic.
  4. Target KPU tanggal 17 Januari 2024 semua surat suara sudah terpenuhi.
  5. Pertamina manambahkan pasokan 10-20% BBM untuk mengatasi kebutuhan masayrakat menjelang Nataru.
  6. Pertamina menyiapkan Satgas Nataru untuk menjaga stabilitas pasokan BBM selama Nataru, jika terjadi kelangkaan BBM Pertamina siap untuk menambah pasokan BBM.
  7. Kasus Rabies selama 3 tahun berturut-turut di wilayah NTT mengalami kenaikan jumlah Korban yang meninggal akibat rabies, saat ini sudah ada 34 korman meninggal rabies.
  8. Kab. Timor Tengah Selatan dengan jumlah korban rabies terbanyak menetapkan status daerah menjadi Kejadian Luar Biasa (KLB)

## **2. Konsolidasi dan Pembahasan Masalah-Masalah Aktual target 2 Laporan, realisasi 1 Laporan : 50 %**

### **1) Rapat Konsolidasi dan Pembahasan Masalah-Masalah Aktual Bersama Badan Intelijen Strtegis (Bais)**

- Hari/Tanggal : Jumat, 17 Februari 2023
- Tempat Pelaksanaan : Aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT
- Peserta Rapat :
- Kesimpulan Hasil Rapat :
  - Harga pangan yang melonjak terutama beras di beberapa Kabupaten/Kota, seperti Kota Kupang, Kab. Flores Timur, Sikka, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya.
  - Menurunnya daya beli masyarakat terhadap beberapa kebutuhan pokok yang berpotensi menimbulkan gejolak sosial.
  - Meningkatnya kasus kriminal seperti pencurian sebagai dampak dari kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat.
  - Kondisi Politik di tahun 2023 terkait Pemilu dan Pilkada serentak 2024
  - Imigran gelap yang melintas batas wilayah RI (terbaru 6 orang imigran gelap asal India yang ditangkap di Rote).
  - Pendeportasian 15 orang Warga negarai Indonesia dari Republik Demokratik Timor Leste yang tidak memiliki dokumen keimigrasian.
  - Penyelundupan Bahan Bakar Minyak dan Rokok di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste.
  - Ancaman penyusupan intelijen asing dengan memanfaatkan situasi perbatasan Indonesia-Timor Leste yang agak longgar.
  - Perlu ada kepastian batas waktu tinggal untuk para imigran di tempat penampungan, yakni Hotel Ina Boi, Lavender dan Kupang Inn serta Rudenim.

### **3. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat**

Kegiatan Rapat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, target 2 laporan realisasi 1 Laporan hasil : 50 %, adalah sebagai berikut:

- Hari/Tanggal : Senin, 27 Maret 2023
- Tempat Pelaksanaan : Hotel Amaris Kupang
- Kesimpulan Hasil Rapat :
  1. Terkait dengan Pemilihan Umum di tahun 2024 perlu menjadi perhatian khusus karena pemilihan umum dilaksanakan secara serentak baik pemilihan anggota dewan kab/kota, provinsi maupun pusat serta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
  2. Terkait ketahanan pangan terjadi lonjakan harga pangan naik 30% dari harga awal, kondisi ini sudah berangsur cukup lama, hal tersebut terjadi karena turunya produksi pangan atau stok persediaan yang kurang.
  3. Terkait pemilu yang akan kita hadapi di tahun 2024 mengingat ini adalah pesta demokrasi jadi perlu memperhatikan distribusi logistik ke daerah- daerah, dan perlu selalu berkoordinasi dan bekerjasama baik horizontal maupun vertikal, secara teritorial perlu menjaga keamanan dan ketertiban bersama-sama dan sekaligus

memberikan sosialisasi terhadap dinamika pelaksanaan demokrasi. Jumlah pemilih untuk saat ini informasi dari KPU yaitu mencapai 4 juta pemilih

4. Kondisi harga beras yang naik ini di picu oleh berbagai hal salah satunya adalah kita masi mendatangkan beras dari Provinsi NTB dan Provinsi Sulawesi Selatan dan dipicu karena perbedaan musim panen pada pulau jawa. Berdasarkan survei harga pasar harga besar kondisi bulan maret yaitu 14.500/kg.
5. Informasi bulog bahwa kondisi bulan maret-april menunggu pasokan beras 17.664.887 ton untuk mengatasi kelangkaan beras di NTT, masalah lainnya adalah terjadinya bencana banjir pada Makasar dan pulau Jawa sehingga terjadi perlambatan pengiriman pasokan beras di NTT, sehingga kita mengantisipasinya dengan mendatangkan beras dari Vietnam dan Thailand. Hal lain yang dilakukan untuk mengatasi lonjakan harga dan kenaikan harga pangan yaitu dengan mengadakan pasar murah.
6. Kebijakan Masuk sekolah jam 05.00 wita yang dianggap terlalu memaksa siswa untuk berangkat lebih pagi dari waktu sebelumnya, yang dirasa tidak menjawab permasalahan pendidikan di Nusa Tenggara Timur, yang berdampak pada optimalnya proses belajar mengajar pada siswa. Secara teoritis harus kita kaji kembali dengan melihat beberapa aspek yaitu aspek psikologis kesehatan, aspek kesehatan, aspek keamanan dan aspek Hak Asasi Manusia dari segala aspek tersebut tidak mendukung untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

#### **4. FORKOPIMDA**

Target 6 Laporan realisasi 5 Laporan : 83 %, adalah sebagai berikut:

##### **1) RAPAT SEKRETARIAT FORKOPIMDA KEADAAN TRIWULAN I**

- Hari/Tanggal : Rabu, 03 Mei 2023
- Tempat Pelaksanaan : Aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT
- Kesimpulan Hasil Rapat :  
Persiapan Pemilu Tahun 2024 maka perlu adanya koordinasi dan kerja sama antara Bawaslu dan KPU sebagai pihak penyelenggara Pemilu di tingkat Provinsi

##### **2) RAPAT SEKRETARIAT FORKOPIMDA TRIWULAN II**

- Hari/Tanggal : Rabu, 27 September 2023
- Tempat Pelaksanaan : Aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT
- Kesimpulan Hasil Rapat :
  1. Tahun 2022 Indeks Kerukunan Beragama provinsi NTT menduduki peringkat 2 dimana terjadi penurunan dari tahun sebelumnya, sehingga perlu upaya untuk bisa kembali pada peringkat 1 di tahun 2023.
  2. Aplikasi *sipantau* (Sistem Pemantauan Pemilu) sampai saat ini belum bisa dipakai, pada wilayah-wilayah tertentu di NTT yang perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah terutama berkaitan dengan tahapan-tahapan pemilu, penetapan kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dan Daerah Pemilihan belum di tentukan.
  3. Distribusi logistik Pemilu ke daerah-daerah sampai ke tingkat TPS perlu diperhatikan mengingat KPU ke kurangan gedung untuk menyimpan logistic Pemilu

### **3) RAPAT SEKRETARIAT FORKOPIMDA TRIWULAN III**

- Hari/Tanggal : Senin, 27 November 2023
- Tempat Pelaksanaan : aula Badan Kesbangpol
- Kesimpulan Hasil Rapat :
  1. Upaya percepatan kepemilikan E-KTP karena yang belum memiliki E-KTP sebanyak 169.112 atau sekitar 59.79%
  2. Terdapat 281.792 Non E-KTP
  3. Strategi upaya percepatan penyelesaian NPHD, menjadi perhatian Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk disesuaikan dan dapat diselesaikan pada tingkat pimpinan.
  4. Terdapat 22 Kab/Kota yang telah melakukan penanda tanganan di aula el-tari tanggal 15 November 2023.

### **4) RAPAT SEKRETARIAT FORKOPIMDA TRIWULAN IV**

- Hari/Tanggal : Jumat, 22 Desember 2023
- Tempat Pelaksanaan : Aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT
- Kesimpulan Hasil Rapat :
  1. Upaya percepatan kepemilikan E-KTP karena yang belum memiliki E-KTP sebanyak 169.112 atau sekitar 59.79%
  2. Terdapat 281.792 Non E-KTP
  3. Strategi upaya percepatan penyelesaian NPHD, menjadi perhatian Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk disesuaikan dan dapat diselesaikan pada tingkat pimpinan.
  4. Terdapat 22 Kab/Kota yang telah melakukan penanda tanganan di aula el-tari tanggal 15 November 2023.

### **5) Rapat FORKOPIMDA NTT**

- Hari/Tanggal : 29 Desember 2023
- Tempat Pelaksanaan : Ruang Rapat Gubernur NTT
- Kesimpulan Hasil Rapat :
  1. Kapolda NTT tetap memproses hukum kasus Papua
  2. Terhadap tuntutan pembubaran ormas  
Ormas Garuda memiliki tanda lapor di Kota Kupang tapi tidak dilevel Provinsi NTT. Untuk itu jika ormas Garuda dinyatakan bersalah dapat dijadikan rekomendasi pencabutan izinnya, sedangkan Ormas Triple X adalah tindakan kelompok bukan ormas.
  3. Masyarakat diminta tidak perlu merespon jika ada kejadian unjuk rasa serupa.
  4. Penjabat Gubernur perintahkan Dinas Peternakan untuk merancang PERDA tentang penanggulangan rabies
  5. Upaya konkrit dalam jangka pendek :
    - Edukasi bahaya rabies
    - Pembasmian HPR liar ( Tidak diikat )
    - HPR yang diikat wajib vaksin
    - Pemda lebih serius tangani persoalan rabies

6. Pembentukan satgas penanggulangan rabies libatkan unsur TNI & POLRI
7. Perintahkan KADISKESDUKCAPIL berkoordinasi dengan KPU perihal data perekaman KTP-E dan melaporkan perkembangannya setiap hari
8. Libatkan KPU & BAWASLU dalam operasional percepatan perekaman KTP-E
9. KESBANGPOL agar memantau proses pelaksanaan Pemilu sesuai tahapannya dan melaporkan pada Penjabat Gubernur.

**5. Monitoring, Evaluasi Koordinasi dan kerjasama intelijen dalam rangka pelaporan situasi daerah untuk pelaksanaan forkopimda,** target pelaporan adalah 39 Pelaporan, realisasi 22, prosentase adalah  $22/39 \times 100 \% = 56.41\%$

- Dalam rangka mendata laporan situasi daerah di kabupaten Alor, Belu, Ende, Manggarai, Malaka, Manggarai , Rote, Sikka, Sumba Barat , Sumba Barat Daya, Sumba Timur , Timor Tengah Utara, Timor Tengah Selatan.

■ Analisis penyebab keberhasilan.

Dapat mendata laporan situasi daerah di kabupaten Alor, Belu, Ende, Manggarai, Malaka, Manggarai , Rote, Sikka, Sumba Barat , Sumba Barat Daya, Sumba Timur , Timor Tengah Utara, Timor Tengah Selatan dengan pencairan anggaran yang ada untuk menyesuaikan dengan permasalahan situasi daerah di kabupaten yang dimaksud.

■ Analisis penyebab kegagalan.

Faktor kegagalan dalam memenuhi target dalam tujuan pelaksanaan sasaran strategis ini yaitu anggaran untuk pelaksana program dalam melaksanakan kegiatan tidak bisa dicairkan seluruhnya.

■ Solusi.

- Diupayakan pada tahun anggaran 2024, Badan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT akan melakukan sosialisasi tentang alamat atau tempat yang baru di masyarakat melalui massmedia elektronik atau massmedia cetak, untuk meningkatkan sasaran strategis tentang Organisasi masyarakat.
- Badan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT akan melakukan koordinasi dan kolaborasi terhadap tujuan-tujuan dari Sasaran Strategis dengan Badan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tingkat Kabupaten/Kota dan dengan instansi-instansi terkait.

### 3.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Setelah dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT selama Tahun 2023, yang diuraikan sebagai berikut :

- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya:

Realisasi secara fisik telah mencapai target , untuk penyerapan anggaran memang tidak terserap secara keseluruhan dikarenakan perencanaan anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan dan tidak bisa seluruh anggaran dicairkan.

### 3.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

1. Sasaran Strategis Keberhasilan : Terwujudnya peningkatan pemahaman wawasan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan. Dalam mendukung pencapaian Strategis tersebut pada Tahun 2023 Badan Kesbangpol didukung dengan pelaksanaan Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan pelaksanaan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, sub kegiatan Pelaksanaan Rapat FPK, Penguatan Karakter Bangsa melalui Pendidikan dan Pelatihan bagi Paskibraka untuk Perayaan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2023 dan Pendidikan dan Pelatihan bagi Paskibraka sejumlah 42 Lembaga Pendidikan Tingkat SMA, untuk Perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2023, untuk perekrutan Calon Paskibraka dari 22 Kabupaten Kota, yang mengikuti kegiatan tersebut adalah 109 Lembaga pendidikan Tingkat SMA. Dan FPK ( Forum Pembauran Kebangsaan) mencapai 29 Lembaga. Realisasi Sasaran Strategis ini mencapai :  $109 + 29 = 138$ . Hasilnya adalah  $138/141 \times 100 \% = 97.87 \%$  Indikator kinerja, target dan realisasinya sebagai berikut :

1. FPK : 29 Lembaga.

2. Lembaga Pendidikan Tingkat SMA, adalah sebagai berikut:

1. Kepala Sekolah MAN MANGGARAI BARAT
2. Kepala Sekolah SMA 1 SABU BARAT
3. Kepala Sekolah SMA KATOLIK BELARIWU
4. Kepala Sekolah SMA KATOLIK FRATERAN PODOR
5. Kepala Sekolah SMA KRISTEN MERCUSUAR
6. Kepala Sekolah SMA KRISTEN WAIBAKUL
7. Kepala Sekolah SMA KRISTEN WAIKABUBAK
8. Kepala Sekolah SMA NEGERI 1 ATAMBUA
9. Kepala Sekolah SMA NEGERI 1 ENDE
10. Kepala Sekolah SMA NEGERI 1 FATULEU
11. Kepala Sekolah SMA NEGERI 1 GOLEWA
12. Kepala Sekolah SMA NEGERI 1 KEFAMENANU
13. Kepala Sekolah SMA NEGERI 1 KOMODO
14. Kepala Sekolah SMA NEGERI 1 KUPANG BARAT
15. Kepala Sekolah SMA NEGERI 1 LANGKE REMBONG
16. Kepala Sekolah SMA NEGERI 1 LARANTUKA
17. Kepala Sekolah SMA NEGERI 1 LOBALAIN

18. Kepala Sekolah SMA NEGERI 1 MAUMERE
19. Kepala Sekolah SMA NEGERI 1 PORA
20. Kepala Sekolah SMA NEGERI 1 RINDI UMALULU
21. Kepala Sekolah SMA NEGERI 1 SAMBI RAMPAS
22. Kepala Sekolah SMA NEGERI 1 SOE
23. Kepala Sekolah SMA NEGERI 1 WEWEWA TIMUR
24. Kepala Sekolah SMA NEGERI 2 BAJAWA
25. Kepala Sekolah SMA NEGERI 2 KALABAHI
26. Kepala Sekolah SMA NEGERI 2 NUBATUKAN
27. Kepala Sekolah SMA NEGERI 4 KUPANG
28. Kepala Sekolah SMA NEGERI HAREKAKAE
29. Kepala Sekolah SMA NEGERI PANTAI BARU
30. Kepala Sekolah SMA S THOMAS AQUINAS
31. Kepala Sekolah SMA SWASTA KATOLIK SYURADIKARA
32. Kepala Sekolah SMAK GIOVANNI KUPANG
33. Kepala Sekolah SMAS ST. KLAUS KUWU
34. Kepala Sekolah SMA NEGERI 1 SOE
35. Kepala Sekolah SMAK 1 NEGERI SOE
36. Kepala Sekolah SMA Dian Harapan Kupang
37. Kepala Sekolah SMA Kristen Citra Bangsa Kupang
38. Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Kupang
39. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kupang Barat
40. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kupang Timur
41. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Soe
42. Kepala Sekolah SMA Efata Soe
43. Kepala Sekolah SMA Swasta Katholik Warta Bakti Kefamenannu
44. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kefamenanu
45. Kepala Sekolah SMA Katholik Surya Atambua
46. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Atambua
47. Kepala Sekolah SMA Plus Santo Albertus Agung Weleun
48. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Malaka Barat
49. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Lobalain
50. Kepala Sekolah SMA Kristen Siloam Ba'a
51. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Liae
52. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sabu Barat
53. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kalabahi
54. Kepala Sekolah SMA 2 Nubatukan
55. Kepala Sekolah SMA 1 Nubatukan
56. Kepala Sekolah SMA Negeri Titihena
57. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Adonara Timur
58. Kepala Sekolah SMK Pelayaran Yappen Rays Maumere
59. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Maumere
60. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Wolowaru
61. Kepala Sekolah SMA Katholik Suryadikara Ende
62. Kepala Sekolah SMKS St. Isidorus Boawae
63. Kepala Sekolah SMA Katolik Baleriwu Danga
64. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Golewa Selatan
65. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Golewa
66. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Langke Rembong
67. Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Borong
68. Kepala Sekolah SMA Swasta Katholik Pancasila Borong
69. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Komodo
70. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Waingapu
71. Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Waingapu
72. Kepala Sekolah MAS AL-aljihad mamboro
73. Kepala Sekolah SMA Kristen Waibakul

74. Kepala Sekolah SMA Negegri 1 Wanukaka
75. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Waikabubak
76. Kepala Sekolah SMK Pancasila Tambolaka
77. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Wewewa Timur.
78. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Borong
79. Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Borong
80. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Aesesa.
81. Kepala Sekolah SMA Muhamadiyah Nagekeo.
82. Kepala Sekolah SMAK Wolosambi Nagekeo.
83. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Nagekeo Tengah.
84. Kepala Sekolah SMAS Nangaroro
85. Kepala Sekolah SMAK Cinta Damai Borong.
86. Kepala Sekolah St Bertholomeus Borong
87. Kepala Sekolah SMAN 7 Kota Komba.
88. Kepala Sekolah SMAN 1 Kota Komba
89. Kepala Sekolah SMAN 4 Kota Komba
90. Kepala Sekolah SMAN Elar.
91. Kepala Sekolah SMKN 1 Kota Kupang.
92. Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kota Kupang
93. Kepala Sekolah SMKN 4 Kota Kupang.
94. Kepala Sekolah SMA Muhamadiyah Kota Kupang.
95. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Kupang.
96. Kepala Sekolah SMA Negeri 10 Kota Kupang.
97. Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Kota Kupang.
98. Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Kota Kupang
99. Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Kota Kupang
100. Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kota Kupang.
101. Kepala Sekolah SMA Kristen 1 Kota Kupang.
102. Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Kota Kupang.
103. Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Kota Kupang
104. Kepala Sekolah SMA swasta Manda elu Sumba Barat Daya.
105. Kepala Sekolah SMK Wee Paboba Sumba Barat Daya
106. Kepala Sekolah SMA Wailangira Sumba Barat Daya
107. Kepala Sekolah SMA Negeri 9 Kota Kupang.
108. Kepala Sekolah SMA PGRI Kota Kupang.
109. Kepala Sekolah SMA Swastisari Kota Kupang.



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PERSENTASE REALISASI KINERJA		Lembaga/ Laporan	Realisasi Jumlah Target
			Target 2023	Realisasi 2023		2023
1	Terwujudnya Peningkatan Pemahaman Wawasan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Partai Politik (10), Organisasi Kemasyarakatan (6), Forum Pembaruan Kebangsaan (25) dan Lembaga Pendidikan (100) yang terlibat dalam program penguatan ideologi dan karakter kebangsaan / 141 lembaga	100% atau 141 lembaga	97.87	partai politik	-
					Ormas	-
					FPK	29
					Lembaga Pendidikan tingkat SMA / sederajat:	109
					Jumlah	138

2. Sasaran Strategis : Terwujudnya Pendidikan politik dan pembinaan partai politik di Nusa Tenggara Timur. Dalam mendukung pencapaian Strategis tersebut pada Tahun 2023 Badan Kesbangpol didukung dengan pelaksanaan Program Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik dengan pelaksanaan kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan Pelaksanaan Bidang pendidikan politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, perwakilan, dan partai politik, pemilihan umum/pemilahan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik dengan sub kegiatan Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilahan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah. Sasaran Strategis ini mencapai 100 % Indikator kinerja, target dan realisasinya sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PERSENTASE REALISASI KINERJA		Lembaga/ Laporan	Realisasi Jumlah Target
			Target 2023	Realisasi 2023		2023
2	Terwujudnya Pendidikan politik dan pembinaan partai politik di Nusa Tenggara Timur	Cakupan partai politik, organisasi kemasyarakatan an Lembaga Pendidikan yang terlibat dalam program peningkatan peran partai politik serta pengembangan etika budaya politik / 309 lembaga	3.55 % atau 11 lembaga	100	partai politik	11
					Lembaga Pendidikan tingkat SMA /Sederajat	0
					Jumlah	11

3. Sasaran Strategis : Meningkatnya jumlah organisasi kemasyarakatan yang divalidasi Dalam mendukung pencapaian Strategis tersebut pada Tahun 2023 Badan Kesbangpol didukung dengan pelaksanaan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pementapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi Kemasyarakatan dengan sub kegiatan Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

Sasaran Strategis ini mencapai 44.89 % Indikator kinerja, target dan realisasinya sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PERSENTASE REALISASI KINERJA		Lembaga/ Laporan	Realisasi Jumlah Target
			Target 2023	Realisasi 2023		2023
3	Meningkatnya jumlah organisasi kemsayarakatan yang divalidasi	Cakupan peningkatan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan/ 49 lembaga	100 % atau 49 Ormas	44.89	Ormas	22 Lembaga

4. Sasaran Strategis : Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya mendukung pencapaian Strategis tersebut pada Tahun 2023 Badan Kesbangpol didukung dengan dengan pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya dengan sub kegiatan Penyusunan Program kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, budaya dan fasilitasi Pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat beragama dan Penghayat kepercayaan di daerah. Sasaran Strategis ini mencapai 100% Indikator kinerja, target dan realisasinya sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PERSENTASE REALISASI KINERJA		Lembaga/ Laporan	Realisasi Jumlah Target
			Target 2023	Realisasi 2023		2023
4	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Meningkatnya ketahanan organisasi kemasyarakatan terhadap ekonomi, sosial dan budaya	100%	75	Dokumen	2 Dokumen

5. Sasaran Strategis : Terlaksananya peningkatan penanganan konflik sosial yang ditangani setiap tahun mendukung pencapaian Strategis tersebut pada Tahun 2023 Badan Kesbangpol didukung dengan pelaksanaan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial dengan kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sub kegiatan Penyusunan Program kerja di bidang Kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, Pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah.

Sasaran Strategis ini mencapai 100% Indikator kinerja, target dan realisasinya sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PERSENTASE REALISASI KINERJA		Lembaga/ Laporan	Realisasi Jumlah Target
			Target 2023	Realisasi 2023		2023
5	Terlaksananya peningkatan penanganan konflik sosial yang ditangani setiap tahun	Cakupan konflik sosial yang ditangani setiap tahun	100%	81.13	5 dokumen yang terdiri dari 53 Laporan	5 dokumen dengan Laporan 43

### 3.8 Perbandingan Data Kinerja.

Perbandingan data kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya berdasarkan indikator kinerja dijabarkan sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PERSENTASE REALISASI KINERJA		Lembaga/ Laporan	Perbandingana Realisasi Target	
			2022	2023		2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya Peningkatan Pemahaman Wawasan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Forum Pembaruan Kebangsaan yang terlibat dalam program penguatan ideologi dan karakter kebangsaan / 141 lembaga	166.7	97.87	partai politik	-	
					Ormas	-	
					FPK	21	29
					Lembaga Pendidikan tingkat SMA/ sederajat :	200	109
					Jumlah	38	138
2.	Terwujudnya Pendidikan politik dan pembinaan partai politik di Nusa Tenggara Timur	Cakupan partai politik & Lembaga Pendidikan yang terlibat dalam program peningkatan peran partai politik serta pengembangan etika budaya politik / 309 lembaga	50,4	100	partai politik	11	11
					Lembaga Pendidikan tingkat SMA /Sederajat	114	0
					Jumlah	125	11
3.	Meningkatnya jumlah organisasi kemsayarakatan yang divalidasi	Cakupan peningkatan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan/ 49 lembaga	164.6	44.89	Organisasi kemasyarakatan	28	26
4.	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Meningkatnya ketahanan organisasi kemasyaraktan terhadap ekonomi, sosial dan budaya	100	75	Meningkatnya ketahanan organisasi kemasyarakatan terhadap ekonomi sosial dan Budaya	2 dok	2 dok

5.	Terlaksananya peningkatan penanganan konflik sosial yang ditangani setiap tahun	Cakupan konflik sosial yang ditangani setiap tahun	100	81.13	Meningkatnya pemantapan kewaspadaan nasional serta penanganan konflik sosial, kerjasama intelijen & pemantuan orang asing	2 Lap	43/53 laporan
----	---	--	-----	-------	---	-------	---------------

### 3.9 Realisasi Anggaran

Berdasarkan perubahan APBD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023, Anggaran Belanja Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp 184.352.330.860,- yang terdiri dari 6 program, yang diuraikan sebagai berikut :

No	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KEUANGAN 2023		% CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN
			ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	
1	2	3	4	5	6
<b>TOTAL ANGGARAN</b>			<b>184.352.330.860</b>	<b>148.186.934.029</b>	<b>92.8%</b>
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.163.227.500	4.389.712.739	85.02%
2.	PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.453.023.640	2.139.161.030	87.21%

1	2	3	4	5	6
3.	PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantuan Situasi Politik.	174.042.905.860	139.374.347.300	80.08%
4.	PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	61.424.000	57.416.000	93.47%
5.	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	289.012.540	258.007.600	89.27%
6.	PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.	2.342.737.320	1.968.289.360	96.40%

Dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan program/kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 bersumber dari APBD sebesar

Rp. **184.352.330.860,-** dengan realisasi keuangan sebesar Rp. **148.186.934.029,-** atau sebesar **80.38%** Dan sisa Rp. **36.165.396.831,-**.

Secara lebih terperinci Pagu dan realisasi anggaran dana APBD bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023 dijabarkan sebagai berikut :

### **1. BELANJA OPERASI**

Belanja Operasi Badan berbagai program/kegiatan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT adalah sebesar Rp. **184.352.330.860,-** dengan realisasi keuangan sebesar Rp. **148.186.934.029,-** atau sebesar **80.38%** dan sisa Rp. 36.165.396.831, adapun besarnya Belanja Operasi terdiri atas:

- Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp. 3.744.148.369.00,- atau 86.86 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 4.310.712.000 , -
- Belanja Barang dan Jasa terealisasi Rp. 5.020.424.860.00,- atau 83.11 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 6.040.986.460.00 .
- Belanja Hibah realisasi Rp. 139.415.620.800.00,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 173.984.434.400.00,- atau sebesar 80.13 %.

### **2. BELANJA MODAL**

Belanja Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT adalah sebesar Rp. **15.898.000,-** dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0 %.

### **3. ANGGARAN PROGRAM**

Realisasi Anggaran Tahun 2023 untuk belanja pada Program di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang terealisasi sebesar Rp. 4.389.712.739,- atau 85.18 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 5.163.227.500
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan direalisasi sebesar Rp. 2.139.161.030,- atau 87,20% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 2.453.023.640,-.
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta budaya Politik direalisasi sebesar Rp. 139.374.347.300,- atau 80.08% dari rencana yang diterapkan sebesar Rp. 174.042.905.860,-.
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan direalisasi sebesar Rp. 57.416.000,- atau 93.47% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 61.424.000,-.
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya direalisasi sebesar Rp. 258.007.600,- atau 89,27% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 289.012.540,-
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial direalisasi sebesar Rp. 1.968.289.360,- atau 84,01% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 2.342.737.320,-

## BAB IV

### PENUTUP

---

#### 4.1.KESIMPULAN

Penyajian Laporan Kinerja ini didasarkan pencapaian sasaran strategis melalui pengukuran realisasi pada Indikator Kinerja Utama yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT. Untuk itu dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

#### 4.2 Keberhasilan Dan Kegagalan Kinerja

Dalam rangka mencapai kinerja sasaran Tahun 2023, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT telah melaksanakan Program dan Kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan analisisnya diperoleh gambaran mengenai capaian kinerja secara keseluruhan dari 5 (lima) sasaran strategis. Disamping itu penyusunan LKIP ini merupakan sarana sebagai bahan evaluasi dan umpan balik dalam menunjang perbaikan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT pada tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan analisisnya diperoleh gambaran mengenai capaian kinerja secara keseluruhan dari 5 (lima) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator berdasarkan RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT Tahun 2019-2023. Dari 5 (lima) sasaran strategis Tahun 2022 terbagik dalam 5 (lima) indikator kinerja, dengan capaian kinerja rata-rata mencapai 79.60 %. dengan capaian Kinerja Keuangan 80.38% dan Kinerja Fisik 79.60 %. Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT didukung dengan adanya 6 (enam) Program dan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 184.352.330.860,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 148.186.934.029,- atau sebesar 80.38%, sisa anggaran Rp. 36.165.396.831,-

#### 4.3. Kendala Dan Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja

Pada tahun 2023 terdapat kendala dan hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT meliputi :

1. Sumberdaya yang terbatas dihadapkan pada dinamika sosial dan politik yang demikian cepat.
2. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;



#### 4.4. Strategi Pemecahan Masalah



Dalam menghadapi kendala dan hambatan yang ada, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT melakukan langkah-langkah demi meminimalisir kendala-kendala yang ada, sebagai berikut :

1. Bimtek dan rapat koordinasi internal untuk peningkatan kompetensi SDM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT.
2. Meningkatkan koordinasi dengan stake holder terkait seperti FKUB, FKDM dan FPK.
3. Meningkatkan fungsi keberadaan website Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT dalam menyajikan data-data yang dimiliki dengan koordinasi secara instensif dengan seksi-seksi.
4. Meningkatkan partisipasi lembaga pendidikan tingkat SMA/ sederajat, partai politik, Organisasi masyarakat dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT.
5. Meningkatkan sinergitas dan koordinasi untuk membangun kesamaan dan kesatuan data dengan sumber atau penyedia data, baik OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi maupun lembaga-lembaga vertikal yang ada, antara lain Kepolisian Daerah Provinsi NTT, TNI, Imigrasi, Depertemen Agama, Dirjen Pemerintahan Umum dan Politik Kementerian Dalam Negeri.
6. Meningkatkan Wawasan Kebangsaan dan pendidikan politik kepada lembaga pendidikan tingkat SMA/ Sederajat, untuk meningkatkan pengetahuan tentang 4 (empat) Konsesnsus Bangsa, serta hak dan kewajiban sebagai pemilih pemula.

Kupang, 30 Januari 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

  
**Ir. Yohanes Oktovianus, M.M**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19661029 119403 1 007

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Perencana Ahli Muda	
Pranata Komputer	